

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Kepresidenan merupakan lembaga eksekutif, dan regulasi yang jelas dan terperinci tentang kewenangan dan tanggung jawab presiden akan sangat penting bagi stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Pembentukan Undang-undang lembaga kepresidenan membantu dalam menjaga keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan melalui suatu bentuk pemisahan kekuasaan yang kongkret. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dampak positif dan negatif dari pembentukan UU Lembaga Kepresidenan terhadap stabilitas pemerintahan, pemisahan kekuasaan, akuntabilitas, dan hak asasi manusia, serta mengkaji sejauh mana pembentukan UU Lembaga Kepresidenan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan stabilitas politik dan sosial. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan RUU Lembaga Kepresidenan Tahun 2001. Berdasarkan analisis pembahasan dapat disimpulkan bahwa urgensi pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan di Indonesia tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari berupa penyalahgunaan wewenang dan tumpang tindih peran lembaga kepresidenan sehingga dapat mewujudkan stabilitas dalam pemerintahan. Implikasi tidak adanya undang-undang tentang lembaga kepresidenan di Indonesia adalah adanya potensi terjadinya ataupun terulangnya penyimpangan seperti yang pernah terjadi di masa lalu saat sebelum pada masa orde baru, orde lama dan era reformasi.

Kata Kunci: Urgensi, Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan, Presiden

**URGENCY FOR THE FORMATION OF LEGISLATION
PRESIDENTIAL INSTITUTION IN INDONESIA**

ABSTRACT

The presidency is an executive institution, and clear and detailed regulations regarding the president's authority and responsibilities will be very important for the stability and efficiency of government. The establishment of the presidential institution law helps maintain balance between the branches of government through a concrete form of separation of powers. The aim of this research is to assess the positive and negative impacts of the establishment of the Presidential Institutions Law on government stability, separation of powers, accountability and human rights, as well as to examine the extent to which the establishment of the Presidential Institutions Law can contribute to increasing political and social stability. The type of research used in this research is the normative juridical method. The primary legal material used is Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations; UU no. 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD; and the 2001 Presidential Institution Bill. Based on the analysis of the discussion, it can be concluded that the urgency of establishing a presidential institution law in Indonesia will not give rise to legal problems in the future in the form of abuse of authority and overlapping roles of the presidential institution so as to create stability in government. The implication of the absence of a law regarding the presidential institution in Indonesia is that there is the potential for irregularities to occur or repeat themselves as has occurred in the past before the New Order, Old Order and Reformation eras.

Keywords: *Urgency, Establishment of the Presidential Institution Law, President*